

TAJUK RENCANA

Magnet Baru Bernama Koalisi Besar

DALAM politik, tidak ada kawan atau lawan yang abadi, yang ada hanya kepentingan abadi. Adagium politik tersebut kian menunjukkan kejelasan, dalam realita tahun politik seperti sekarang ini. Sekalipun berbeda dukungan bahkan berbeda koalisi dalam Pemilu 2019, itu menjadi pemandangan yang biasa kita lihat saat ini.

Pemandangan itu muncul dalam pertemuan Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketum Partai Perindo Hary Tanoe beberapa hari lalu. Dalam pertemuan tersebut Prabowo terus terang menyatakan terbuka untuk Perindo bila mau gabung dalam koalisi yang besar (KR, 6/4). Padahal sebagaimana diketahui, Prabowo dengan Gerindra dalam Pemilu 2019 adalah memimpin Koalisi Adil Makmur yang mengajukan diri sebagai calon presiden. Sedangkan Perindo pada waktu yang sama berada dalam Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Jokowi.

Di dalam tahun politik seperti sekarang, silaturahmi antarelite partai sebagai upaya menjalin komunikasi politik, adalah hal yang biasa dan akan kian sering terjadi. Upaya membangun serta menumbuhkan kematangan berpolitik sekaligus menjaga agar demokrasi berjalan di atas rel yang benar, menjadi upaya yang terus dijalin. Bahkan retorika sebagaimana dikatakan Prabowo dalam pertemuan di kediaman Kertanegara, Rabu (5/4) petang lalu : *“Kami ingin membangun barisan yang cukup besar dan solid. Supaya menjamin kelangsungan pembangunan bangsa,”* akan kian sering terdengar.

Frasa baru: koalisi besar, adalah kunci yang menjadi magnet. Menurut KBBI, koalisi merupakan kerja sama antara beberapa partai untuk memperoleh kelebihan suara dalam parlemen. Jika merujuk KBBI, maka koalisi besar tentu berujuan memperoleh kelebihan suara yang besar dalam parlemen.

Wacana terjalinnya koalisi besar ini bergulir saat Presiden Jokowi berkumpul bersama lima ketum parpol yang sebelumnya tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR yang digagas Gerindra dan PKB) dengan Koalisi Indonesia Baru (KIB, terdiri Golkar, PAN dan PPP) di Markas PAN, awal April. Dengan koalisi besar diharap mampu memenangkan pilpres dalam satu kali putaran.

Jika merujuk siapa-siapa yang tergabung dalam koalisi besar dimana terdapat partai-partai besar tersebut, sangat dimungkinkan kemenangan akan diraih. Apalagi, kelima partai itu sekarang merupakan pendukung Jokowi dan Jokowi pun ‘merestui’ terwujudnya koalisi besar tersebut. Tetapi tentu saja, keberadaannya bukannya tanpa tantangan atau kendala. Akan sulit ketika sudah bicara siapa yang diusung sebagai calon presiden atau wakil presiden.

Penentuan calon presiden dan calon wakil presiden, tentu tidak semudah membalikkan tangan. Bahkan disinilah titik krusial dan akan menjadi persoalan besar. Karena masing-masing ketum akan merasa dirinya membawa gerbong besar dan ‘memberikan sumbangan suara’ besar dalam pemilihan tersebut. Kesulitan berikut dengan banyaknya yang bergabung memunculkan banyak pandangan berbeda. Tantangannya, adalah bagaimana menyatukan suara partai anggota.

Mungkin saja, koalisi besar akan bisa mengamankan pemerintahan masa mendatang. Walaupun presiden sangat kuat posisinya, karena dipilih langsung rakyat. Namun menurut pakar hukum tatanegara UGM, Zainal Arifin (rumahpemilu.org, 2019) dengan kuasa yang besar dan ditopang dukungan yang sangat besar oleh lembaga yang seharusnya menjadi pengawas (parlemen), sangat mudah membuat presiden tidak akan terkawal dengan baik. Artinya, parlemen sebagai lembaga pengawas sulit menjalankan *checks and balances* sebagaimana sumpahnya. □-d

KALURAHAN

Pucung Girisubo, Gunungkidul mengadakan sarasehan dengan tema cukup strategis. Yakni rencana pengembangan potensi maritim untuk mendukung sektor pariwisata. Sebuah langkah yang patut didukung mengingat mereka mempunyai kesadaran akan potensi yang dimiliki dan bertanggung jawab untuk mengembangkannya dalam kerangka pengentasan kemiskinan.

Visi Gubernur DIY 2022-2027 adalah Menyongsong Abad Samudera Hindia Untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja. Momentum sejarah sedang mendekat ke tiga kabupaten pesisir, yakni Kuloprogo, Bantul dan Gunungkidul. Perpindahan bandara dari Sleman ke Kulonprogo jelas mengubah lanskap kawasan pesisir. Secara beriringan dibangun pula akses jalan tol yang menghubungkan ketiga kawasan yang disambungkan dengan jalur jalan lintas selatan (JJLS).

Menggeser Prioritas

Memindahkan titik tumpu dan menggeser prioritas pembangunan dari budaya agraris menuju budaya maritim (*among tani dagang layar*) memerlukan pendekatan yang integral dan holistik yang berbasis ekologis. Tidak saja harus menanggalkan ego sektoral dan mengedepankan sinergi, juga dibutuhkan orientasi dan keberpihakan yang nyata terhadap masyarakat pesisir.

Pemerintah harus memiliki *road map* yang jelas agar program berdurasi peradaban ini tepat sasaran. Pembangunan kawasan pesisir tidak saja harus sesuai karakter wilayah tetapi juga bisa menjadi mercusuar dalam pengertian sebenarnya. Pengelolaan potensi bahari tentu tidak hanya memperkenalkan (kembali) masyarakat pada budaya ikan. Apalagi jika yang mau dijadikan penggerak adalah sektor pariwisata bahari. Mendirikan desa wisata maritim, misalnya, bukan sekedar memindahkan model desa wisata seperti yang ada selama ini ke desa pesisir. Karakter desa wisata bahari berbe-

Wahjudi Djaja

da dengan desa wisata seperti pada umumnya.

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 93 Tahun 2020, Desa Wisata Bahari (Dewi Bahari) adalah kawasan yang mempunyai potensi daya tarik wisata dari pemanfaatan jasa sumber daya kelautan dan perikanan menja-



di lokasi wisata bahari. Lebih dari sekedar wisata air. Dewi Bahari menempatkan ruh budaya bahari sebagai karakter yang diperkuat dengan beragam atraksi wisata yang khas pesisiran dan akses yang mudah dijangkau wisatawan. Dewi Bahari juga menyiapkan paket wisata yang berfungsi sebagai daya sedot wisatawan.

Dinas Kelautan dan Perikanan DIY setidaknya telah menetapkan 34 Desa Maritim di wilayah pesisir selatan. Selain diorientasikan untuk meningkatkan perekonomian warga pesisir, program yang bersumber dari dana-is itu juga merupakan langkah awal menyongsong laut sebagai masa depan. Menarik untuk didiskusikan seberapa efektif desa maritim mampu menjawab tantangan za-

man. Perubahan sosial yang ditandai dengan beroperasinya Bandara YIA, akses jalan tol, JJLS, dan massifnya investor di kawasan pesisir telah terjadi di depan mata.

Bumdes

Dalam upaya mewujudkan laut sebagai halaman depan dengan Dewi Bahari sebagai icon, pemerintah perlu mendorong, memberi ruang dan kepercayaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai generatornya. Tidak saja perlu sedi-ni mungkin mengidentifikasi potensi unggulan dan menyiapkan *grand design* Dewi Bahari, Bumdes nantinya juga harus memerankan diri sebagai *off taker* bagi semua produk kelautan.

Bagai gurita, Bumdes harus memiliki kaki berupa UMKM, Pokdarwis, Poktankan, kelompok nelayan dan Taruna Bahari sebagai penopang sekaligus penjamin kesinambungan produksi. Bumdes juga harus membangun jaringan pasar dan merajut kerja sama kemitraan dengan BUMD/BUMN. Dengan peran dan tanggung jawab seperti itu, Bumdes bertindak sebagai katalisator bergeraknya Sistem Ekonomi Gotong Royong (Segoro).

Dari skema inilah, keadilan dan kesejahteraan sosial bisa didistribusikan secara benar, merata dan adil. Sehingga kawasan pesisir selatan benar-benar menjadi halaman depan Yogyakarta. □d

*) **Wahjudi Djaja SS MPd, Dosen STIEPar API Yogyakarta, Anggota Pokja Ketahanan Ekonomi Badan Kesbangpol DIY)**

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Medsos dan SARA di Tahun Politik

MEMASUKI tahun Pemilu 2024, intensitas perbincangan isu politik makin meningkat di 2023. Siapa calon presiden dan calon wakil presiden diusung partai politik atau gabungan parpol ramai di media massa apalagi media sosial (medsos). Membaca arah peta koalisi partai, siapa partai ditinggal gerbong koalisi yang sudah dibentuk, pergerakan aktor politik, harapan pada penyelenggara pemilu dan lainnya, agar pemilu berjalan sukses hampir setiap hari menjadi berita.

Banjir informasi politik medsos menjadi berkah demokrasi dan kebebasan. Namun bisa menjadi bencana jika arus informasi politik didominasi hoaks, ujaran kebencian, fitnah. Apalagi berita bohong dibalut isu-isu sensitif seperti suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang membahayakan masa depan kebebasan dan demokrasi serta mengancam keragaman di Indonesia.

Menambah Kecemasan

Belajar dari pemilu dan pilkada sebelumnya maupun momen politik globalóptertarungan politik tak hanya terjadi di dunia realitas tapi ramai jagat digital, bahkan politik virtual mendorong aksi dunia nyata. Politik medsos menghadirkan kecemasan akan masa depan demokrasi dan eksistensi negara. Dalam buku *Marx in Age of Digital Capitalism*, Vincent Mosco mengingatkan bahwa medsos menciptakan ekosistem yang sangat rawan manipulasi dan kejahatan.

Semakin mengkhawatirkan pengguna internet dan medsos mengalami kenaikan. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2022 menyebutkan pengguna internet di Indonesia mencapai 210 juta bertambah 35 juta atau sekitar 77% penduduk Indonesia merupakan pengguna internet. Dari sisi

Andi Andrianto

keaktifan berselancar medsos data We Are Social terdapat 191 juta naik 12,35% pada 2022.

Kenaikan jumlah pengguna internet dan kita tergolong pengguna aktif medsos, menambah kecemasan. Survei Indeks Literasi Digital Kemkominfo 2022 yakni 3.54 berada di level sedang. Penting digarisbawahi dari survei itu 72,6% responden memperoleh informasi medsos dan 52,2% responden mengaku tak mengecek informasi mereka terima dari medsos. Padahal 55,9% sering menemui hoaks di medsos Facebook, 16% berita daring, 13,9% dari Whatsapp dan 13,1% dari YouTube. Bahkan, 30,8% responden mrnyatakan medsos sebagai sumber berita paling dipercaya setelah televisi 43,5%.

Problem di medsos makin kompleks jelang tahun politik tat kala melalui medsos dijumpai hoaks politik dan penggunaan isu SARA. Pada Pilpres 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika mendata 771 konten hoaks selama periode pemilu 2019. Dari 771 konten hoaks mayoritas berkaitan politik jelang Pilpres 2019. Pun pada Pilkada 2020, sebanyak 38 isu hoaks (periode 1 September-18 November 2020) tersebar melalui platform digital.

Saluran Politik

Lampu kuning penggunaan medsos dan SARA di tahun politik. Medsos harus mengedepankan keadaban, kepatuhan pada norma hukum berlaku, menjunjung etika dan kepentingan bersama. Ini sejalan dengan tren perubahan saluran politik lewat medsos yang

meningkat.

Pemerintah harus membuat kebijakan dan strategi jitu mencegah atau mengurangi penggunaan medsos sebagai sarana kampanye negatif yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam keutuhan bangsa. Lokus dan fokus kebijakan menyentuh aspek penghapusan akun atau melakukan *take down* pada konten hoaks dan mengatur serta mengawasi platform global adalah keharusan demi efektivitas kebijakan diambil.

Sukses hajatn politik dengan prosedur pemilu dijalankan, lahir pemimpin yang mendapat legitimasi kuat rakyat : pemimpin pembawa perubahan dan kemajuan bagi masyarakat. Yakni pemimpin yang tak memanfaatkan medsos dan isu SARA sebagai komoditi politik untuk duduk di kursi kekuasaan sesaat. □-d

*) **Andi Andrianto, (Pegiat di Lingkar Informasi Politik)**

Pojok KR

Disiapkan 9.000 toilet di 127 rest area

-- Toilet tidak bisa dianggap remeh keberadaannya

Nekat jual petasan, 90 orang di Semarang dijebloskan penjara

-- Bagaimana dengan yang membuat?

Bimtek Ngadi Busana untuk Dharma Wanita

-- Jangan sampai 'saltum'

Berabe

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogo. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Dra Hj Fadmi Sustitwi, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subehan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris). Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Permkahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif . Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tang-gungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Ishaq Zubedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP